



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Padang Panjang Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Padang Panjang Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang 25 Februari 2025

Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE

NIP.197004051997031004

2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**KECAMATAN
PADANG PANJANG BARAT**
JL. RASUNA SAID NO, 44 KAMPUNG MANGGIS PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

CAMAT PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG



ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 – 2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat yang dihasilkan di tahun 2024 sebagai berikut :

❖ **Tujuan**

Tujuan dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat : “Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah” dengan Indikator Tujuannya adalah “Nilai penyelenggaraan Pelayanan Publik” dengan target tahun 2024 sebesar 90% dan realisasi sebesar 90%.

❖ **Sasaran**

Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan, Kelurahan;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.

❖ Indikator Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat, terdiri atas 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan dengan target tahun 2024 sebesar 39,20 % dan realisasi sebesar 38,36 % atau persentase capaian 97,86 %.
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target tahun 2024 sebesar 97,85 dan realisasi 2024 sebesar 97,75 atau persentase capaian 99,90 %.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- c. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai

ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. informasi dan sarana pengaduan layanan yang tersedia, kotak saran tersedia sudah difungsikan, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target SKM tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
- e. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Barat;
2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
2. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Barat ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Padang Panjang Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	5
1.3 Permasalahan Utama (strategic issued).....	6
1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	7
 BAB II PERJANJIAN KINERJA	 8
Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	8
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran.....	20
 BAB IV PENUTUP	 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra 2024 – 2026 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
Tabel	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Barat
Tabel	Perhitungan Nilai SKM Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Barat
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Barat
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dan Target Akhir Renstra (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Barat
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Sumber Daya
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Barat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Barat

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Barat

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Barat;
2. Mendorong Kecamatan Padang Panjang Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Padang Panjang Barat untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Padang Panjang Barat di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, terdiri dari :

1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Barat

➤ **Camat :**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Barat, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

➤ **Seksi Sosial**

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial,

pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.

➤ **Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup kecamatan dan kelurahan.

1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat

➤ **Lurah :**

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketertiban umum, memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, pemeliharaan aset dan keuangan di lingkup Kelurahan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pembinaan lomba kelurahan dan lurah berkompetensi, urusan kesatuan bangsa dan politik, kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran

drainase, persampahan, penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipan di kelurahan.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, urusan pembangunan dan penataan ruang, perumahan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Kelurahan.

➤ **Seksi Pelayanan dan Sosial**

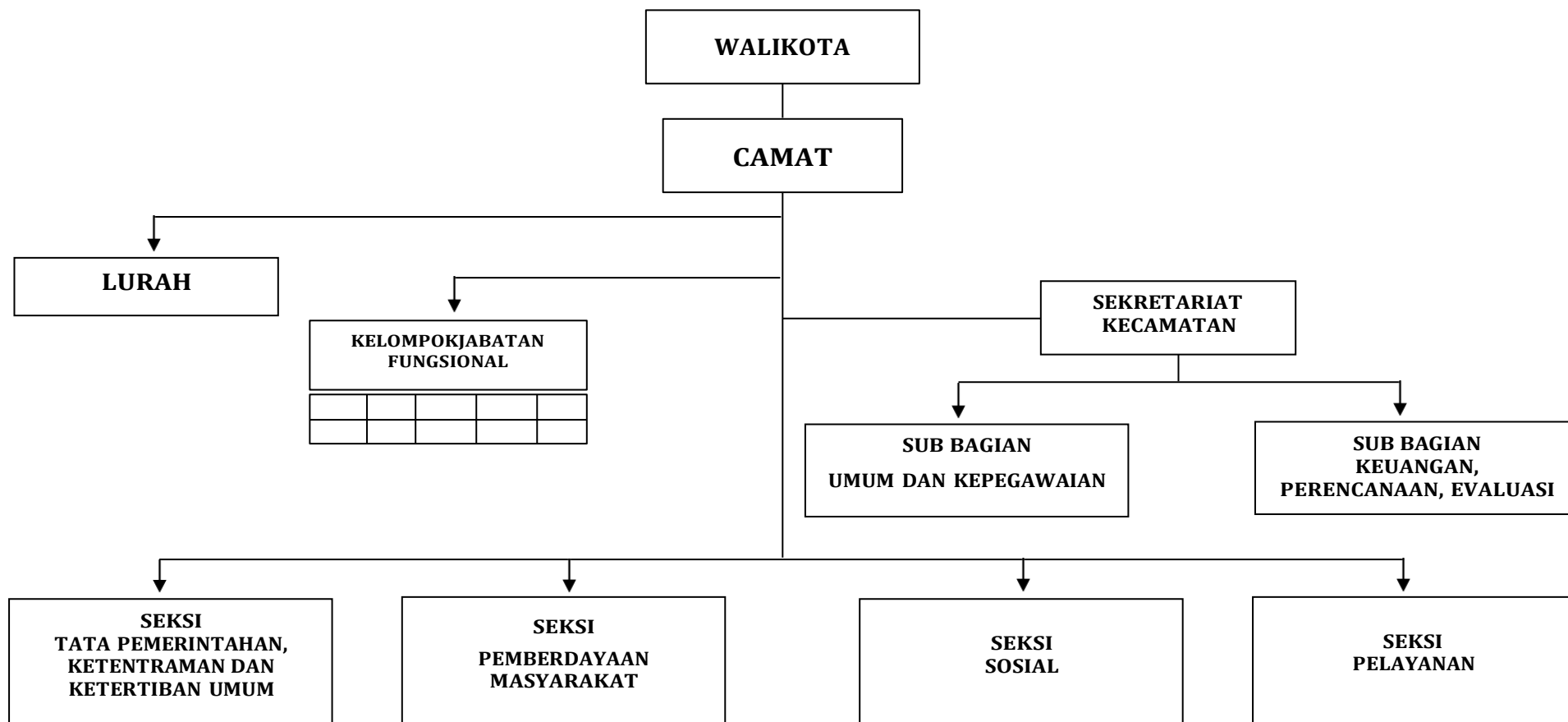
Seksi Pelayanan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

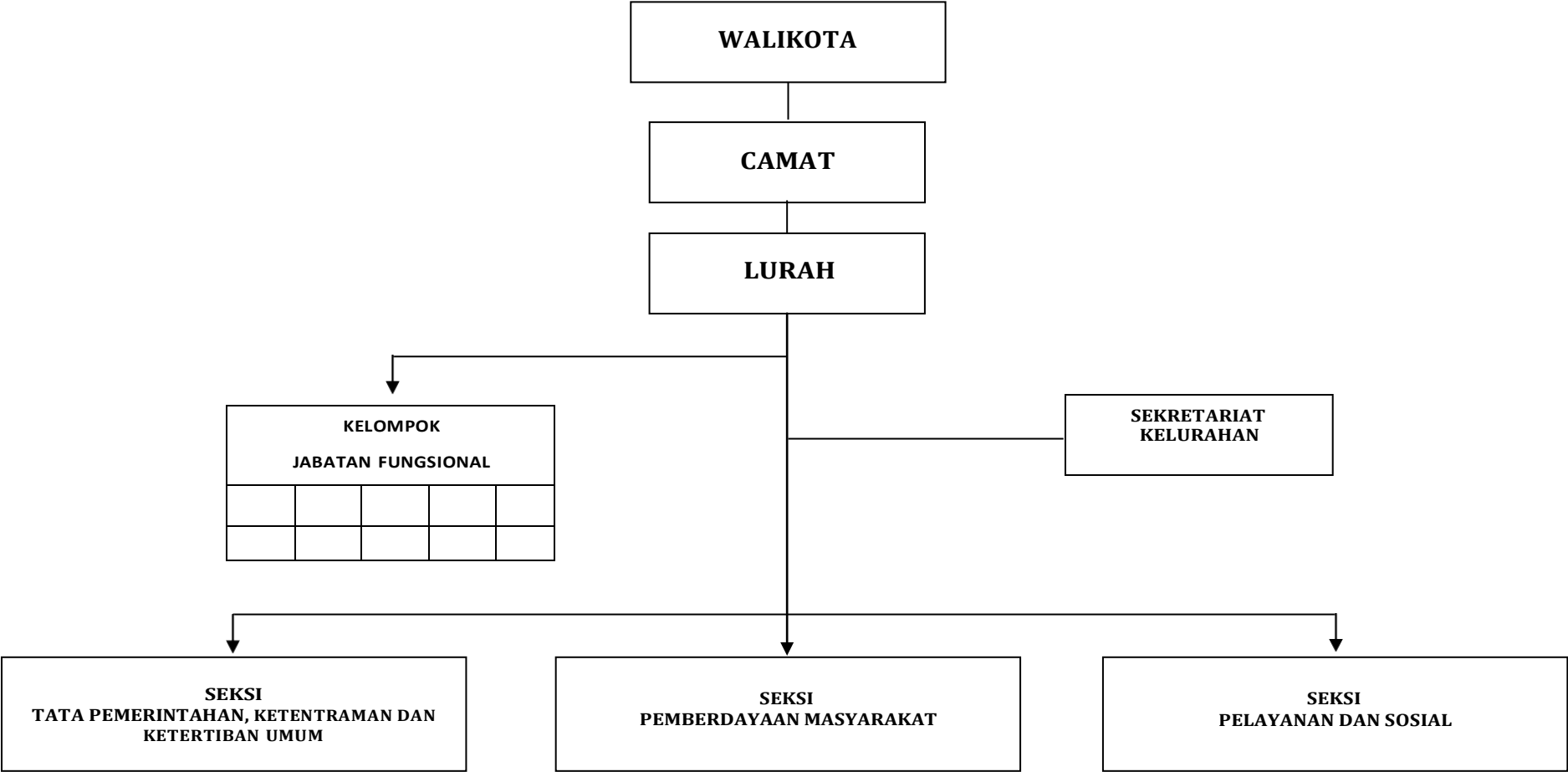
Gambar 1.1: STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



Gambar 1.2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang didukung oleh sumber daya manusia yang berada di kecamatan dan kelurahan, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 1.1

**Data Pegawai ASN, Pegawai Honorer, Tenaga Harian Lepas (THL)
di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat**

No	Uraian	Lk	Pr	Jumlah
1.	Camat	1	-	1 orang
2.	Sekretaris Camat	-	1	1 orang
3.	Kepala Seksi di Kecamatan	2	2	4 orang
4.	Kasubbag di Kecamatan	1	1	2 orang
5.	Fungsional Umum di Kecamatan	5	3	8 orang
6.	Tenaga Honorer	-	2	2 orang
7.	Tenaga Harian Lepas Kecamatan: - Operator - Penjaga Kantor - Sopir - Petugas kebersihan Kantor	2 1 2 -	2 - - 1	4 orang 1 orang 2 orang 1 orang
8.	Lurah	8	-	8 orang
9.	Sekretaris Lurah	2	6	8 orang
10	Kasi di Kelurahan	8	14	22 orang
11	Fungsional Umum di Kelurahan	3	2	5 orang
12	Tenaga Harian Lepas di Kelurahan - Operator - Penjaga Kantor - Petugas Kebersihan Kantor	1 8 1	7 - 6	8 orang 8 orang 7 orang
	Total	45	47	92 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat dirinci personil/pegawai yang ada di kecamatan dan kelurahan keadaan Desember 2024 (tidak termasuk THL Kebersihan Lingkungan), sebagai berikut:

1. Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 26 personil yakni : ASN 16 orang, Tenaga Honorer 2 orang, THL Operator Komputer 4 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 2 orang, dan THL Sopir 2 orang.
2. Kelurahan Silaing Bawah sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
3. Kelurahan Silaing Atas sebanyak 7 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
4. Kelurahan Pasar Usang sebanyak 7 personil yakni : ASN 4 orang, THL Operator

- Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
5. Kelurahan Kampung Manggis sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
 6. Kelurahan Tanah Hitam sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
 7. Kelurahan Balai Balai sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
 8. Kelurahan Pasar Baru sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
 9. Kelurahan Bukit Surungan sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang

Tabel 1.2
Data Kepegawaian Menurut Golongan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	-	-	-
2	Golongan III	29 orang	24 orang	53 orang
3	Golongan II	05 orang	01 orang	06 orang
4	Golongan I	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2024

Tabel 1.3
Data Kepegawaian Menurut Eselon

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III		01 orang	-
2	Eselon IV.a	10 orang	03 orang	13 orang
3	Eselon IV.b	15 orang	17 orang	32 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2024

Tabel 1.4
Data Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata II	02 orang	04 orang	06 orang
2	Strata I	24 orang	15 orang	39 orang
3	Diploma III	00 orang	01 orang	01 orang
5	SLTA	08 orang	04 orang	12 orang
4	SLTP	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2024

4. ASPEK STRATEGIS KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang secara umum memiliki fungsi strategis yaitu merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Dalam hal ini menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengupayakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan; melaksanakan administrasi kecamatan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Analisa SWOT Kecamatan Padang Panjang Barat

a. Kekuatan (Strengths)

- Struktur Organisasi jelas dan lengkap

Kecamatan Padang Panjang Barat termasuk 8 Kelurahan yang berada dilingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki struktur organisasi yang lengkap, baik itu pejabat struktural di Kecamatan Padang Panjang Barat maupun di Kelurahan di Lingkup Kecamatan Padang Panjang Barat, walaupun ada jabatan yang dalam kondisi kosong di beberapa Kelurahan tetapi telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Pelaksana Tugas Jabatan yang kosong.

Tugas dan fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam LKjIP.

- Realisasi Anggaran yang tinggi dan sesuai dengan target yang direncanakan dan sesuai prinsip *value for Money*.

Realisasi anggaran mencapai 96,59%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana dimana Kecamatan Padang Panjang Barat telah menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan anggaran.

b. Kelemahan (Weakness)

- Minimnya pengetahuan mayoritas pejabat struktural dalam teknologi terkhususnya pengoperasian computer, pemahaman tugas dan fungsi masing-masing jabatan.
- Masih kurangnya anggaran untuk pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan sarana dan prasarana serta pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung bangunan kantor

- Keterbatasan sarana dan prasarana peralatan yang menunjang administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat, khususnya Kelurahan.
 - Pelatihan dan pengembangan kompetensi Pejabat Struktural di Kelurahan belum ada.
- c. Peluang (Opportunity)
- Jumlah penduduk yang potensial
 - Adanya sumber daya alam yang dapat diolah
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - Adanya pelimpahan sebagian wewenang dari Walikota kepada Camat
- d. Ancaman (Threat)
- Keterbatasan Pagu Anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana beresiko terhadap output kinerja sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat,
 - Kondisi peralatan penunjang administrasi perkantoran beresiko dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
 - Pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing pejabat structural beresiko penurunan kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat
 - Organisasi masyarakat belum berfungsi secara optimal, dimana di Kecamatan Padang Panjang Barat memfasilitasi Lembaga-lembaga yang merupakan perpanjangan tangan dari Perangkat Daerah dalam pembangunan

5. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis juga berkaitan dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada perencanaan tahun sebelumnya dan akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Oleh sebab itu maka perlu upaya untuk mengatasinya. Isu strategis yang disepakati dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang yang dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPD).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, Kecamatan Padang Panjang Barat masih menemui permasalahan utama (strategic issued) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat

B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan memuat permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
- b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini menguraikan anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.1 RENSTRA

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun atas dasar Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada untuk Tahun 2024 – 2026 untuk pembangunan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat disesuaikan dengan RPD Kota Padang Panjang 2024 – 2026 yang diatur melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Untuk lebih jelasnya ujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra 2024 – 2026 Kecamatan Padang Panjang Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

Kecamatan Padang Panjang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai penyelenggaraan Pelayanan Publik	Survey IKM	90%	93%	95%
2		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	(Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100%	39.20%	39.50%	39.80%
3		Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	(kuisisioner, aplikasi)	97.85%	97.90%	98.00%

Sumber data : Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023

Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Padang Panjang.

a. Visi dan Misi

Dalam penyusunannya, RPD Tahun 2024-2026 telah menyesuaikan dengan Visi RPJPD yaitu “Kota Yang Maju Lestari dan Islami” dengan 5 Misi yaitu :

- 1) Mewujudkan Moralitas, Kemandirian dan Daya Saing Masyarakat;
- 2) Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian;
- 3) Mewujudkan Lingkungan yang Asri Lestari;
- 4) Mewujudkan daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan sarana;
- 5) Mewujudkan tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

b. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dari Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu ” **Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah**”

c. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sasaran dari Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri dari 2 sasaran yaitu :

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan, Kelurahan;
- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.

d. Sasaran sendiri biasa direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama 2024 – 2026 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang:

- Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan

Kelurahan;

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

a. **PERJANJIAN KINERJA**

Pada tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 2024 – 2026.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024 pada Sasaran 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 97,85% , sebagaimana tertera dalam tabel Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 berikut ini:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024				
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan / Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39.20%	39.20%
2	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparandan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97.85%	97.85%
No	Program	Anggaran		
		Sebelum	Sesudah	
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 4.062.650.560	Rp	3.828.708.650
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 4.339.381.100	Rp	4.312.224.700
3	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 20.191.100	Rp	24.966.800
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 10.999.850	Rp	248.738.150

Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tidak ada perubahan target kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :**

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan / Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39,20 %	38,36 %	97,86 %
2	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,85 %	97,75 %	99,90 %

➤ **Sasaran I : “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan”.**

Untuk pencapaian Target Sasaran Pertama dengan Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan Definisi Operasional: “Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi (2024) dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan (2024) dan dinyatakan dalam persentase”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Partisipasi}}{\text{Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan}} \times 100\%$$
$$\frac{\text{Rp. 8.252.406.000,00}}{\text{Rp. 8.433.222.610,00}} \times 100\%$$
$$= 97,86\%$$

(Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024)

Yang dimaksud dengan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan yaitu keseluruhan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan di tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran partisipasi dihitung dengan asumsi/perkiraan dana/anggaran partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti:

- Kehadiran rapat kelurahan
- Kehadiran musrenbang RT
- Kehadiran musrenbang Kelurahan
- Kehadiran musrenbang Kecamatan
- Lomba
- Pertandingan olah raga
- Lomba Kel Berprestasi
- Lomba HUT KOTA HUT RI
- Pelatihan Keolahragaan Kelurahan
- Kegiatan Seni dan Olahraga Kelurahan
- Goro Persiapan Khatam
- Goro persiapan untuk kegiatan Qurban

- Kegiatan gotong royong lainnya yang melibatkan masyarakat
- dan lain-lain.

Untuk realisasi tahun 2024 pencapaian Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan target sebesar 39.20% dan realisasi sebesar 38,36% dengan capaian realisasi 97,86%. Faktor pengungkit dari pencapaian ini masih cukup tingginya kepedulian masyarakat seperti tahun sebelumnya dalam ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, kegiatan perlombaan dan lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan diwilayah Kecamatan Padang Panjang Barat.

➤ **Sasaran II “Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan”.**

Sebagai Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat sehingga Kecamatan Padang Panjang Barat dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan inovasi-Inovasi terkait pelayanan Publik. Terdapat 9 Unsur yang dinilai, sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2024 hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 9 unsur pelayanan yang ada, berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik. Sehingga realisasi tahun 2024 ini memperoleh Nilai SKM sebesar 97,75% dari target yang ditetapkan sebesar 97,80% atau persen capaian sebesar 99,97%, namun masih dalam kategori mutu kinerja pelayanan Sangat Baik atau A, seperti dalam tabel berikut ini.

Rumus Penghitungan SKM:

$$\begin{aligned} & \text{Total Nilai Interval} \\ & \text{Konversi IKM} \times 25 \text{ Total} \\ & \text{NIK IKM Tahun 2024} = \\ & 3,910 \times 25 \\ & = 97,75 / \text{SANGAT BAIK} \end{aligned}$$

**Kelompok unsur Berdasarkan 9 ruang lingkup
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang**

No	Unsur Pelayanan	NRR Per Butir Pertanyaan	Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai SKM U9	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan Layanan		4.000	100,00	0.444
1.1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan	4.000			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan		4.000	100,00	0.444
2.1	Kemudahan prosedur pelayanan	4.000			
3	Waktu penyelesaian pelayanan		3.960	99,00	0.440
3.1	Waktu penyelesaian pelayanan	3.960			
4.	Biaya/Tarif		4.000	100,00	0.444
4.1	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	4.000			
4.2	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	4.000			
5.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan		3.980	99,50	0.442
5.1	Kesesuaian hasil pelayanan yang didapatkan dengan yang ditetapkan	3.980			
6.	Kompetensi Pelaksana		3.920	98,00	0.435
6.1	Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani	3.920			
7.	Perilaku Pelaksana		4.000	100,00	0.444

7.1	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dalam pelayanan	4.000			
8.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan		3.420	85,50	0.380
8.1	Penanganan pengaduan	2.840			
8.2	Alasan tidak melakukan proses pengaduan	4.000			
9.	Sarana dan Prasarana		3.947	98,667	0.438
9.1	Kelengkapan sarana/prasarana	3,940			
9.2	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan	3,940			
9.3	Kebersihan lingkungan layanan	3,960			
	TOTAL	50.540	35.227		3.7910
	Nilai IKM Unit Layanan	97.75			
	Mutu	A			
	Kinerja Pelayanan	Sangat Baik			

Sumber Data : Laporan Hasil SKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, 2024

Adapun produk layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat yang diberikan kepadamasyarakat sebanyak 8 (delapan) Layanan pada tahun 2024, yaitu :

1. Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
2. Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Kepemilikan Tanah dan Surat Ahli WarisPensiunan PNS
4. Legalisasi Surat Susunan Keluarga untuk Pensiunan PNS
5. Legalisasi Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP)
6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Legalisasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
8. Legalisasi Keterangan Domisili

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berikutnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39%	35,57%	91,21%	39,20%	32,44%	82,75%	39,20%	38,36%	97,86%
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	92%	91,75%	99,73%	97,85%	93.90 %	95,96%	97,85%	97,75%	99,90%

Pada Tahun 2022 Adapun Realisasi Persentase Partisipasi masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Jumlah Nilai Partisipasi				
Masyarakat		X 39 %		
Jumlah Anggaran				
Rp 8.610.430.000,00				
Rp 9.440.409.450,00		X 39 %	=	35,57 %

Sedangkan untuk pencapaian Kinerja Persentase Nilai Partisipasi masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Keuangan				
		X 100 %		
Target				
35,57 %				
39 %		X 100 %	=	91,21 %

Persentase Partisipasi masyarakat mencapai 35,57 % sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 91,21 %.

Dari Target yang ditetapkan sebesar 92% , Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang berhasil dicapai Kecamatan Padang Panjang Barat pada Tahun 2022 adalah sebesar 91,75% dengan kategori “Sangat Baik”. Artinya Persentase Capaian Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2022 adalah sebesar 99,73 %. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kinerja layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat semakin baik dari tahun ke tahun

Untuk pencapaian Target Sasaran Pertama dengan Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan Definisi Operasional: “Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi (2023) dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan (2023) dan dinyatakan dalam persentase”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Partisipasi}}{\text{Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 6.150.070.000,-}}{\text{Rp. 7.988.165.650,-}} \times 100\%$$

$$\text{Rp. 7.988.165.650,-}$$

$$= 76.99\%$$

(Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023)

Yang dimaksud dengan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan yaitu keseluruhan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan di tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran partisipasi dihitung dengan asumsi/perkiraan dana/anggaran partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti:

- Kehadiran rapat kelurahan
- Kehadiran musrenbang RT
- Kehadiran musrenbang Kelurahan
- Kehadiran musrenbang Kecamatan
- Lomba
- Pertandingan olah raga
- Lomba Kel Berprestasi
- Lomba HUT KOTA HUT RI
- Pelatihan Keolahragaan Kelurahan
- Goro Persiapan Khatam
- Goro persiapan untuk kegiatan Qurban
- Kegiatan gotong royong lainnya yang melibatkan masyarakat
- dan lain-lain.

Untuk realisasi tahun 2023 pencapaian Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan target sebesar 39.20% dan realisasi sebesar 32,44% dengan

capaian realisasi 76.99%. Faktor pengungkit dari pencapaian ini masih cukup tingginya kepedulian masyarakat seperti tahun sebelumnya dalam ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, kegiatan perlombaan dan lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat.

Pada tahun 2023 hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 17 unsur pelayanan yang ada, terdapat 15 unsur pelayanan yang berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik, 1 unsur pelayanan lainnya masuk dalam kategori kinerja unsur pelayanan Baik dan 1 unsur yang termasuk dalam kinerja unsur pelayanan Kurang Baik. Sehingga realisasi tahun 2023 ini memperoleh Nilai SKM sebesar 93,90 dari target yang ditetapkan sebesar 97,85% atau persen capaian sebesar 100,96%, namun masih dalam kategori mutu kinerja pelayanan Sangat Baik atau A

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Yang Akan Dicapai Pada Akhir Periode Renstra OPD (Tahun 2026) seperti pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target
Akhir Renstra (per Sasaran Strategis)

SASARAN STRATEGIS I : “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan”

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan /Kelurahan	38,36%	39,80%	96,38 %

SASARAN STRATEGIS II : “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Dan Kelurahan”

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,75%	98,00%	99,75

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tabel Indikator dari Sasaran I (satu) yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan” dengan realisasi sebesar 38,36 % dari target 39,20% dengan capaian 97,86 %

Adapun penyebab rendahnya realisasi pada indicator ini adalah adanya kegiatan yang seharusnya dilaksanakan yang melibatkan partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan, yaitu berupa pengadaan gedung serbaguna kelurahan Pasar baru dimana kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan Pagu Anggaran kegiatan ini tidak mendukung output kegiatan yaitu berupa Tersedianya Gedung serbaguna Kelurahan Pasar Baru. Selanjutnya yang kedua yaitu Pembuatan Kanopi di Kelurahan Pasar Usang, dimana untuk Pembuatan Kanopi ini terkendala Kondisi Bangunan Gedung Kelurahan Pasar Baru belum bersertifikat dan berada diatas tanah KAN Gunung sehingga untuk pelaksanaan kegiatan ini harus ditunda dan dibatalkan.

Tabel indikator dari sasaran II (dua) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 97,85 dengan realisasi 97,75 atau persentase capaian 99,90%. Dari kedua tabel ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat telah berhasil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran strategis yang telah di tetapkan pada awal tahun RPD maupun pada RPD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- c. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal;
- e. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan peran lembaga masyarakat merupakan faktor terpenting dalam pencapaian sasaran kinerja di Kecamatan Padang Panjang Barat

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Barat;
2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukanusaha-usaha sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
2. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
3. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Barat ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

Aspek	Pendorong keberhasilan	Penghambat/ kegagalan	Rencana Tindak Lanjut
SDM	Adanya partisipasi lembaga kemasayarakatan di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat	Pengetahuan Pejabat structural tentang tugas dan fungsi serta pengetahuan tentang pengoperasian computer	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM
Kegiatan	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Keterbatasan anggaran	Usulan penambahan pagu anggaran
Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey kepuasan masyarakat dengan nilai tinggi	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pencapaian nilai sempurna untuk SKM	Pengadaan sarana prasarana pendukung administrasi perkantoran

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

5.1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

a. Komposisi dan Kualifikasi SDM

- Sumber daya manusia yang berada dilingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat 92 orang yang terdiri dari 59 orang PNS, 2 orang Pegawai Honorer, 31 orang Tenaga Harian Lepas.
- Sebaran Golongan, mayoritas Golongan III (89,83%) yang merupakan Pegawai dengan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum
- Tingkat Pendidikan, Mayoritas berijazah Sarjana (S1) yang merupakan Pejabat Struktural

b. Efisiensi dan Permasalahan SDM

- Keunggulan, Struktur organisasi cukup lengkap dengan pembagian tugas yang jelas. Kualifikasi pendidikan cukup baik, dengan mayoritas pegawai berpendidikan tinggi.
- Kelemahan, untuk pejabat Struktural yang berada di lingkungan

Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat, kebanyakan tidak menguasai pengoperasian computer serta kurang memahami tugas dan fungsi mereka sebagai pejabat structural, sehingga terkendala dalam menyampaikan dan melaksanakan tugas dan butuh bantuan dari Tenaga Harian Lepas (Operator) untuk pengoperasian computer dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelurahan

c. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi SDM

- Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.

5.2. Efisiensi Sumber Daya Keuangan

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran

- Total Anggaran Rp. 19.381.125.944,00 dengan realisasi Rp.18.719.714.527,00 (96,59%)
- Distribusi Anggaran :
 - Rp. 10.891.330.230,00 (58,18%) untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Rp. 4.107.797.302 (21,94%) untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Rp. 3.482.027.970,00 (18,60%) untukPrgram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Rp. 15.424.550,00 (0.08%) untuk Program Koordinasi dan Ketertiban Umum
 - Rp. 223.134.475,00 (1.19%) untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

b. Efisiensi dan Permasalahan Anggaran

- Keunggulan

Realisasi anggaran mencapai 96,59% menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran

Kegiatan Administrasi Perkantoran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan dan target.

- Kelemahan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum optimal, dimana untuk kegiatan pelatihan dan Pembangunan sarana dan prasarana masih minim anggaran

c. Rekomendasi untuk meningkatkan Efisiensi Anggaran

- Strategi Perbaikan

Mengusulkan untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya dalam hal pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mengoptimalkan usulan Masyarakat untuk prioritas pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

5.3. Efisiensi Sarana dan Prasarana

a. Kondisi Sarana dan Prasarana

- Beberapa fasilitas pendukung belum optimal, terutama perangkat elektronik seperti laptop, printer, dan peralatan kerja lainnya.
- Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas, Gedung bangunan dan fasilitas kantor telah terealisasi, tetapi masih ada kekurangan dalam pagu untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan Kantor terkhusus untuk pemeliharaan di beberapa kantor lurah karena adanya refocusing anggaran 2024
- Belum ada anggaran yang dialokasikan untuk Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor, mobiler kantor, proyektor, dan lain lain yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam perencanaan pagu anggaran kebutuhan fasilitas kerja.

b. Efisiensi Permasalahan Sarana dan Prasarana

- Keunggulan

Pemeliharaan peralatan dan mesin telah terealisasi dengan baik dengan capaian 90,41 % dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung dan bangunan kantor dengan capaian realisasi 99,60%

Kebutuhan dasar operasional masih terpenuhi, tetapi masih ada pemeliharaan yang membutuhkan pagu anggaran lebih khususnya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung bangunan kantor

- Kelemahan

Minimnya peralatan kerja menyebabkan penurunan efisiensi operasional

Kurangnya dukungan fasilitas pendukung, seperti peralatan computer untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.

- c. Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi sarana dan prasarana

- Strategi perbaikan

- Mengusulkan untuk meningkatkan pagu anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung bangunan kantor.

- Mengalokasikan dana untuk relokasi bangunan Gedung kantor untuk kelurahan Balai-Balai atau Rehabilitasi Berat untuk bangunan Gedung Kantor Lurah Balai Balai

- Mengusulkan anggaran untuk pengadaan peralatan yang menunjang administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.

5.4. Kesimpulan dan Rekomendasi Utama

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta sasaran

partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan dan kecamatan, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel. 3.4
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Aspek	Keunggulan	Permasalahan	Rekomendasi
SDM	Struktur organisasi cukup lengkap dengan pembagian tugas yang jelas. Kualifikasi pendidikan cukup baik, dengan mayoritas pegawai berpendidikan tinggi.	Untuk pejabat Struktural yang berada di lingkungan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat, kebanyakan tidak menguasai pengoperasian computer serta kurang memahami tugas dan fungsi mereka sebagai pejabat structural, sehingga terkendala dalam menyampaikan dan melaksanakan tugas dan butuh bantuan dari Tenaga Harian Lepas (Operator) untuk pengoperasian computer dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.

Aspek	Keunggulan	Permasalahan	Rekomendasi
		kelurahan	
Anggaran	Realisasi anggaran mencapai 96,59% menunjukkan efektifitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran Kegiatan Administrasi Perkantoran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan dan target.	Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum optimal, dimana untuk kegiatan pelatihan dan Pembangunan sarana dan prasarana masih minim anggaran	Mengusulkan untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya dalam hal pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mengoptimalkan usulan Masyarakat untuk prioritas pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
Sarana dan Prasaarana	Pemeliharaan peralatan dan mesin telah terealisasi dengan baik dengan capaian 90,41 % dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung dan bangunan kantor dengan capaian realisasi 99,60% Kebutuhan dasar operasional masih terpenuhi, tetapi masih ada pemeliharaan yang membutuhkan pagu anggaran lebih khususnya untuk pemeliharaan sarana	Minimnya peralatan kerja menyebabkan penurunan efisiensi operasional Kurangnya dukungan fasilitas pendukung, seperti peralatan computer untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.	Mengusulkan untuk meningkatkan pagu anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung bangunan kantor. Mengalokasikan dana untuk relokasi bangunan Gedung kantor untuk kelurahan Balai-Balai atau Rehabilitasi Berat untuk bangunan Gedung Kantor Lurah Balai Balai

Aspek	Keunggulan	Permasalahan	Rekomendasi
	dan prasarana Gedung bangunan kantor		Mengusulkan anggaran untuk pengadaan peralatan yang menunjang administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.

B. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai penunjang urusan pemerintah, yaitu urusan Urusan Wajib, Urusan Pemerintahan Umum mendapat alokasi anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 19.381.125.944,00 dan realisasi sebesar Rp. 18.719.714.527,00 atau 96,59 %. Dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dengan realisasi Program, Kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota total dana sebesar Rp. 11.110.850.194,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 10.891.330.230,00 (98,02%) dengan kegiatan :
 - a) Kegiatan Administrasi Keuangan dengan dana sebesar Rp. 8.875.892.682,00 realiasi keuangan sebesar Rp. 8.867.929.732,00 (99,91%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 8.875.892.682,00 Kegiatan ini bertujuan untuk membayarkan Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realissi Fisik. Subkegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.867.929.732,00 (99,91%)

Hasil subkegiatan ini berupa terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat dengan jumlah PNS kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 59 orang

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp.485.762.772,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 413.717.530,00 (85,17%) dengan subkegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 27.798.600,00. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang penerangan kantor Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.953.900,00 (78,97%).

Hasil kegiatan ini berupa alat-alat listrik di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat

2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 112.818.700,00. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, terlaksananya kebersihan perkantoran. Realisasi Fisik Subkegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 106.233.900 (94,16%). Hasil kegiatan ini berupa tersedianya Alat tulis kantor, peralatan penunjang computer, alat kebersihan dan retribusi kebersihan di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 19.448.450,00. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan administrasi perkantoran. Realisasi Fisik Subkegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 17.326.750,00 (89,09%). Hasil kegiatan ini berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan (spanduk, fotocopy surat menyurat, Jilid DPA, DPPA 2024, Cetak Map) di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 325.697.022,00. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam

maupun luar kota dan luar daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran. Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 268.202.980,00 (82,35%). Hasil kegiatan ini berupa Rapat Koordinasi di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat serta Rapat Koordinasi keluar Kota dan Luar Propinsi Sumatera Barat

- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp. 1.094.153.740,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.1.022.314.563,00 (93,43%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 1.258.400,00. Kegiatan ini bertujuan untuk pelayanan surat menyurat kantor. Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.250.000,00 (99,33%). Hasil kegiatan ini tersedianya materai di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 95.484.940,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi tagihan telpon, listrik dan air di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 93.560.763,00 (97,98%). Hasil dari kegiatan ini berupa pembayaran retribusi kebersihan, tagihan air, listrik dan telpon di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 997.410.400,00. Kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran Honor Pegawai Administrasi dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 927.503.800,00 (92,99%). Hasil kegiatan ini terbayarnya honor 2 (dua) orang Pegawai Harian, 12 (Duabelas) orang Operator Kecamatan dan Kelurahan, 8 (delapan) orang Petugas Kebersihan, 2 (dua) orang sopir dan 9 (sembilan) orang Penjaga Kantor Kelurahan dan Kecamatan.

- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp. 476.303.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 411.208.405,00 (92,99%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 185.673.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.156.302.100,00 (84,14%). Hasil kegiatan ini berupa terpeliharanya kendaraan dinas sebanyak 47 unit kendaraan dinas di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 50.900.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan gedung kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.020.000,00 (90,41%). Hasil kegiatan ini terpeliharanya peralatan dan mesin kantor Kelurahan dan Kecamatan (Printer, Komputer, Laptop, CCTV, Meja, Kursi, Lemari) dan dapat dibayarkannya belanja jasa non pegawai (upah) Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 0 % realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0%).
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.209.730.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 208.886.305,00 (99,60%). Hasil kegiatan ini berupa telah terpeliharanya Gedung Kantor Camat Padang Panjang Barat, Rumah Dinas Camat Padang Panjang Barat serta Gedung Kantor Lurah, Gedung Pertemuan se Kecamatan Padang Panjang Barat yang menjadi asset Kecamatan Padang Panjang Barat

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan dana sebesar Rp 4.224.074.700,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 4.107.797.302,00 (97,25%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan dana sebesar Rp. 1.661.592.300,00 realisasi keuangan sebesar Rp.1.623.715.194,00 (97,72%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - 1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan dana sebesar Rp 1.661.592.300,00. Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan fasilitas umum di wilayah masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.623.715.194,00 (97,72%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran honor THL (Petugas Kebersihan Lapangan, Operator Bentor) Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga, pembayaran pajak Becak Motor dan Tersedianya Bahan dan perlengkapan kebersihan lapangan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat.
 - b) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan dana sebesar Rp. 3.782.219.650,00 realisasi keuangan sebesar Rp.3.482.027.970,00 (92,06%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan dana sebesar Rp.3.782.219.650,00. Kegiatan ini bertujuan untuk Pembinaan Karang Taruna, Kader Posyandu serta Pokja Sehat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.482.027.970,00 (92,06%). Hasil Kegiatan ini berupa pembayaran Honor Kader Posyandu, Honor Kader Dasawisma, Lomba Kader Posyandu dan Kader Dasawisma Pemberian Makan Tambahan untuk Balita, Pembinaan Pokja Sehat dan Karang Taruna.

- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan dana sebesar Rp..3.782.219.650,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 3.482.027.970,00 (92,06%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 917.167.800,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 617.198.170,00 (67,29%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 179.812.650,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.938.750,00 (96,73%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
 2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 201.960.000,00 Kegiatan ini bertujuan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 50 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.000.000,00 (22,28%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Pembangunan Sarana di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat berupa Pembuatan Gerbang Selamat Datang Kelurahan Pasar Usang.
 3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 535.395.150,00. Kegiatan ini bertujuan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 85 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 398.259.420,00 (74,39%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat di wilayah masing-masing Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat, Pembinaan dan Pembayaran Honor LPM, Posyantek di Kelurahan.
- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 2.865.051.850,00 realisasi keuangan sebesar Rp..2.864.829.800,00 (99,99%) dengan subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp.2.865.051.850,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Kegiatan RT dan LPM. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.864.829.800,00 (99,99%). Hasil kegiatan ini berupa terlaksananya pembayaran Honor Perangkat RT dan makan minum kegiatan RT serta Pengadaan Pakaian seragam Sekretaris dan Bendahara RT se Kecamatan Padang Panjang Barat.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan dana sebesar Rp.22.780.800,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 15.424.550,00 (67,71%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan dana sebesar Rp. 22.780.800,00 realisasi keuangan sebesar Rp.. 15.424.550,00 (67,71%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 22.780.800,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi FKPM Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 90 % dan realisasi keuangan sebesar Rp..15.424.550,00 (67,71%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Koordinasi antar Babin Kelurahan dan Kecamatan dalam mencegah tindak kejahatan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan dana sebesar Rp.241.200.600,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 223.134.475,00 (92,51%) dengan subkegiatan sebagai berikut
- a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan dana sebesar Rp. 241.200.600,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 223.134.475,00 (92,51%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan dana sebesar

Rp.233.713.300,00. Kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 215.955.675,00 (92,40%). Hasil Kegiatan ini berupa fasilitasi dan mengikuti kegiatan MTQ Tingkat Kota Padang Panjang.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 7.487.300,00. Kegiatan ini bertujuan untuk dijalankannya kegiatan Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.178.800,00 (95,88%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Rapat Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan per triwulan selama Tahun 2024

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Padang Panjang Barat

No.	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
38.	Kewilayahan	Kecamatan Padang Panjang Barat	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100	100	100		
				Jumlah dana	10.265.837.780	10.034.868.419	97,75		
			a).Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	100	100	100		
				Jumlah dana	8.157.962.812	8.070.297.486	98,93		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	71 orang	65 orang	91,55	Adanya PNS yang mutasi ke OPD lain	Permintaan tambahan PNS ke OPD Kecamatan Padang Panjang Barat
				Jumlah dana	8.157.962.812	8.070.297.486	98,93		
			b).Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100		
				Jumlah dana	33.180.000	33.180.000	100		
			- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	75 Paket	100		
				Jumlah dana	33.180.000	33.180.000	100		
			c). Administrasi Umum	Persentase pemenuhan	100	100	100		

No.	Ururan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi
			Perangkat Daerah	layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Jumlah dana	485.762.772	413.717.530	85,17		
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	jenis komponen peralatan listrik	jenis komponen peralatan listrik	100		
				Jumlah dana	27.798.600	21.953.900	78,97		
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	10 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	10 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	100		
				jumlah peralatan kebersihan yang disediakan					
				Jumlah Dana	112.818.700	106.233.900	94,16		
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	2 jenis komponen barang yang dicetak dan diadakan Fotocopy , jilid, cetak map, cetak amplop	2 jenis komponen barang yang dicetak dan diadakan Fotocopy , jilid, cetak map, cetak amplop	100		
				Jumlah Dana	19.448.450	17.326.750	89,09		
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	2900 kali	2900 kali	100		
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	90 kali	83 kali	92,00		
				Jumlah Dana	325.697.022	268.202.980	82,35		
			c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100	100	100		
				Jumlah dana	145.558.000	142.980.000	98,23		
			- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit (Laptop/PC/ Printer	20 Unit (Laptop/PC/ Printer	100		

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi
				Jumlah dana	145.558.000	142.980.000	98,23		
			d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	3 Jenis Urusan (Jasa Kantor, Jasa Surat Menyurat, Pelayanan Umum)	3 Jenis Urusan (Jasa Kantor, Jasa Surat Menyurat, Pelayanan Umum)	100		
				Jumlah dana	1.094.153.740	1.022.314.563	93,43		
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Tagihan Listrik, Air dan Telpo yang dibayarkan	217 Laporan	217 Laporan	100		
				Jumlah dana	95.484.940	93.560.763	97,98		
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko dan Materai yang disediakan	125 lembar	125 lembar	100		
				Jumlah dana	1.258.400	1.250.000	99,33		
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas dan Pegawai Harian yang dibayarkan honoranya	29 orang THL, 2 orang Pegawai Harian	29 orang THL, 2 orang Pegawai Harian	100		
				Jumlah dana	997.410.400	927.503.800	92,99		
			e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24 jenis peralatan dan mesin, 13 unit gedung	24 jenis peralatan dan mesin, 13 unit gedung	100		
				Jumlah dana	476.303.000	411.208.405	86,33		
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara, jumlah BBM yang disediakan, jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan	2 kendaraan dinas beroda 4, 36 kendaraan dinas beroda 2	2 kendaraan dinas beroda 4, 36 kendaraan dinas beroda 2	100		
				Jumlah dana	185.673.000	156.302.100	84,18		
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 jenis peralatan	21 jenis peralatan	100		
				Jumlah dana	50.900.000	46.020.000	90,41		

No.	Ururan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi
			- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 gedung	0 gedung	(100)		
				Jumlah dana	30.000.000	0	(100)	Pemasangan Kanopi di Kelurahan Pasar Usang tidak bisa dilaksanakan karena ada sengketa tanah Bangunan yang belum selesai	Tidak dilaksanakan penganggaran untuk Tahun berikutnya
			- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	13 gedung	13 gedung	100		
				Jumlah dana	209.730.000	208.886.305	99,60		
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100%	100%	100		
				Jumlah dana	4.224.074.700	4.107.797.302	97,25		
			a) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	12 kali	12 kali	100		
				Jumlah dana	1.661.592.300	1.623.715.194	97,72		
			- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	8 lokasi pelayanan 46 orang THL 8 unit bentor	8 lokasi pelayanan 46 orang THL 8 unit bentor	100		

No.	Ururan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi
			Prasarana Pelayanan Umum	Umum					
				Jumlah dana	1.661.592.300	1.623.715.194	97,72		
			b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan	7 jenis urusan (Forum Kecamatan Sehat, Pokja Sehat, Posyandu, Dasawisma, PKK, Pembinaan UKS, Karang Taruna)	7 jenis urusan (Forum Kecamatan Sehat, Pokja Sehat, Posyandu, Dasawisma, PKK, Pembinaan UKS, Karang Taruna)	100		
				Jumlah dana	2.562.482.400	2.484.082.108	96,94		
			- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Forum, 8 Pokja Sehat 1 kegiatan lomba Posyandu 271 kader 289 Kader	1 Forum, 8 Pokja Sehat 1 kegiatan lomba Posyandu 271 kader 289 Kader	100		
				Jumlah dana	2.562.482.400	2.484.082.108	96,94		
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	39 %	38,26 %	97,86	Partisipasi masyarakat belum terlaksana terkendala kondisi pagu dan refocusing anggaran terhadap beberapa kegiatan	Dilakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan yang ditampung pada Usulan Musrenbang Tahun 2025
				Jumlah dana	3.782.219.650	3.482.027.970	92,06		
			a) Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 Jenis Pemberdayaan (Musrenbang,	3 Jenis Pemberdayaan (Musrenbang,	100		

No.	Ururan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana)	Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana)			
				Jumlah dana	2.562.482.400	2.484.082.108	96,94		
			- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan, 1 Kegiatan Musrenbang Kecamatan	8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan, 1 Kegiatan Musrenbang Kecamatan	100		
				Jumlah dana	179.812.650	173.938.750	96,73		
			- Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	2 Lokasi (Pembuatan Gerbang Selamat datang Kelurahan Pasar Usang dan Pengadaan Gedung Serba Guna Pasar Baru)	1 Lokasi (Pembuatan Gerbang Selamat datang Kelurahan Pasar Usang)	50	Pengadaan Gedung Serba Guna Kelurahan Pasar Baru tidak dapat dilaksanakan, karena pagu yang dialokasikan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan	Usulan untuk Penambahan Pagu Anggaran untuk Pengadaan Gedung Serba Guna Kelurahan Pasar Baru
				Jumlah dana	201.960.000	45.000.000	22,28		
			- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas 2 Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi, 2 kegiatan kesenian dan keolahragaan	8 Pokmas 1 Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi, 2 kegiatan kesenian dan keolahragaan	80	Kegiatan Pelatihan di Kelurahan Bukit Surungan tidak dilaksanakan	

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi
								karena refocusing anggaran	
				Jumlah dana	535.395.150	398.259.420	74,39	Kegiatan Lomba Posyantek Tidak dapat dilaksanakan, karena beberapa rekening mengalami pergeseran untuk penambahan pagu TPP Bulan Desember 2024	
			b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi	133 RT	133 RT	100		
				Jumlah dana	2.865.051.850	2.864.829.800	99,99		
			- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100		
				Jumlah dana	2.865.051.850	2.864.829.800	99,99		
			4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketentraman Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat	10 Laporan	10 Laporan	100	Belanja pada Rekening Penggantian Transport FKPM Kelurahan tidak dilaksanakan secara menyeluruh,	Pengurangan Pagu Anggaran Penggantian Transpot untuk Tahun berikutnya

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi
								karena tidak terjadi tindakan kriminalitas di beberapa bulan terakhir	
				Jumlah dana	22.780.800	15.424.550	67,71		
			a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib	2 jenis	2 jenis	100		
				Jumlah dana	22.780.800	15.424.550	67,71	Belanja pada Rekening Penggantian Transport FKPM Kelurahan tidak dilaksanakan secara menyeluruh, karena tidak terjadi tindakan kriminalitas di beberapa bulan terakhir	Pengurangan Pagu Anggaran Penggantian Transpot untuk Tahun berikutnya
			- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan	108 Laporan	100		

No.	Ururan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi
				Jumlah dana	22.780.800	15.424.550	67,71	Belanja pada Rekening Penggantian Transport FKPM Kelurahan tidak dilaksanakan secara menyeluruh, karena tidak terjadi tindakan kriminalitas di beberapa bulan terakhir	Pengurangan Pagu Anggaran Penggantian Transpot untuk Tahun berikutnya
			5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100%	100%	100		
				Jumlah dana	45.852.450	41.105.250	89,65		
			a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	5 Kegiatan	4 Kegiatan	80	Kegiatan Forkompimcam pada triwulan terakhir tidak dilaksanakan, adanya pergeseran anggaran	
				Jumlah dana	241.200.600	223.134.475	92,51		
			- Pembinaan	Jumlah Orang yang	1 kegiatan	1 kegiatan MTQ	80	Kegiatan	Penambahan

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi
			Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	kunjungan ke mushalla di lokasi kelurahan masing sebanyak 8 kelurahan, 1 kegiatan MTQ			Safari RAmadhan, Kunjungan Tim Ramadhan ke Mushalla tidak dilaksanakan karena pagu anggaran tidak mencukupi	pagu untuk kegiatan kunjungan MTQ ke Mushalla di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat
				Jumlah dana	233.713.300	215.955.675	92,40		
			- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	4 Dokumen	70	Kegiatan Forkompimca m pada triwulan terakhir tidak dilaksanakan, adanya pergeseran anggaran	
				Jumlah dana	7.487.300	7.178.800	95,88		
	- Jumlah				19.381.125.944	18.719.714.527	96,59		

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Barat pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 3 (tiga) dari Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2024 - 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2024 dapat disimpulkan dari analisis 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur yaitu :

1. Pada indikator dari sasaran I (satu) yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan” dengan realisasi sebesar 38,36% dari target 39,20% dengan capaian 97,86%. Faktor keberhasilan dari pencapaian indikator dari sasaran I ini yaitu belum optimalnya kepedulian masyarakat dalam ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, kegiatan perlombaan dan lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat, baik dalam bentuk gotong royong maupun mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana;
2. Indikator dari sasaran II (dua) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 97,85 dan untuk realisasi 2024 ini 97,75 atau capaian 99,90%, peningkatan ini bisa terjadi karena ada beberapa indikator penilaian SKM yang mengalami peningkatan.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- c. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

- a. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Barat;
- b. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
- b. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
- c. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
- d. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Barat ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala, maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Padang Panjang, 05 Januari 2024



CAMAT PADANG PANJANG BARAT

ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Jalan Rasuna Said No. 4 Kampung Manggis kode pos 27111
Email: kee.padangpanjangbarat@padangpanjang.go.id-website : padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMI AR RAHMAN, ST

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG BARAT

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA

Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapail target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami .

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Padang Panjang, 01 Nopember 2024

Pihak Pertama

CAMAT PADANG PANJANG BARAT



ROMI AR RAHMAN, ST

NIP. 19821012 201101 1 008



Pihak Kedua

PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)		(5)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39,20%	39,20%
2	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	97,85%	97,85%

	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.649.310.360	10.914.881.759	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.339.381.100	4.312.224.700	
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.062.650.560	3.828.708.650	
4	Koordinasi Ketentraman dan Keleritiban Umum	20.191.100	24.986.800	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.999.850	248.738.150	


 P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG
 SONNY BUDAYAN PUTRA

Padang Panjang, 01 November 2024
 KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

 ROMI AR RAHMAN, ST
 NIP.-19821012 201101 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 - 2025
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
							ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase				Masih kurang aktif lembaga masyarakat yang berada di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat	Survey IKM	Kuisiener	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Padang Panjang Barat	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	Persentase	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	Persentase	masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	(Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100%	(jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan di kecamatan/kelurahan / jumlah masyarakat yang ada di kecamatan/kelurahan) x 100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Padang Panjang Barat	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase tingkat layanan	Persentase	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang layanan yang dapat diberikan di Kelurahan dan Kecamatan	(kuisiener, aplikasi)	(jumlah layanan yang diberikan/jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan) x 100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Padang Panjang Barat	
				Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum	Persentase						
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Persentase						

Padang Panjang, 02 Januari 2024
Camat Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang

ROMLIAR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008.

